

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN I
TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan I Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 22 Maret 2023

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelola, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Melalui keberadaan PPID diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara mudah, cepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan dengan baik, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi pada Triwulan I dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik pada awal tahun serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan I meliputi kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan informasi publik yang tersedia bagi masyarakat.

C. Tujuan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan I, memantau kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam mendukung layanan PPID, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.

D. Manfaat

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik melalui PPID pada Triwulan I memberikan beberapa manfaat, antara lain untuk mengetahui sejauh

mana pelaksanaan pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pengelola PPID dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi ini juga memberikan gambaran mengenai kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dengan adanya evaluasi secara berkala, diharapkan pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Prasarana dan Sarana

PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya:

- a. Front desk yang berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
- b. Ruangan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan konsultasi permohonan informasi.
- c. Peralatan yang tersedia meliputi komputer, printer, scanner, dan akses jaringan internet untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan penyampaian informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas PPID yang menangani pelayanan informasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2023 sebanyak **15 orang** yang terdiri dari pengelola informasi, petugas administrasi, serta tim teknis yang mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. Anggaran

Pada Triwulan I tahun 2023, pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama untuk pengembangan aplikasi dan website PPID yang lebih memadai.

4. Permohonan Informasi

Selama periode Januari sampai dengan Maret 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar **belum menerima permohonan informasi dari masyarakat.**

BAB III

MONITORING PELAKSANAAN PPID

1. Statistik Permohonan Informasi

Berikut statistik permohonan informasi pada Triwulan I tahun 2023:

Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Waktu Pemenuhan
Januari	0	0	0	0 hari
Februari	0	0	0	0 hari
Maret	0	0	0	0 hari

2. Penyelesaian Permohonan Informasi

Pada Triwulan I tahun 2023 tidak terdapat permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar, sehingga tidak terdapat proses penyelesaian permohonan informasi pada periode ini.

3. Kendala yang Dihadapi

- Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPID pada Triwulan I antara lain:
- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik.
 - b. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem dan website PPID yang lebih memadai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan I tahun 2023 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selama periode Triwulan I belum terdapat permohonan informasi dari masyarakat.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

2. Saran

- a. Perlu peningkatan dukungan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik.
- b. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait pengelolaan informasi publik.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai layanan permohonan informasi melalui PPID.